

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Menghimpun dan Menyiapkan SK Penetapan Standar Harga

No. SK : 900/9594/BPKAD/2020

Persyaratan

1. Usulan OPD beserta lampiran dan dokumen pendukung BMD tahun berkenaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur, disertai dokumen
2. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan.
3. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Gubernur paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
4. Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang.
5. Berdasarkan hasil penelitian, Gubernur menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun.
6. Dalam hal Gubernur tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Gubernur melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang disertai alasan.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun Anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Pengguna Barang Milik Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Samratulangi 94111 085241298181

bpkad.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Pengaduan Layanan

Website bidang Aset BPKAD <https://nogunambara.provsulteng.id>